



RENCANA KERJA

TAHUN 2022

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan sebagai wujud petanggungjawaban visi, misi, tujuan. Sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*)

Rencana Kerja Tahun 2022 ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap

untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja ini di masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Bandung, Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung



Drs. Hikmat Ginanjar, M.Si.
NIP. 196406291985031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja-SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dengan program-program Pemerintah Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Renja-SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, akuntabel, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*.

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal.

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Tujuan utama pendidikan di Kota Bandung adalah mempercepat pencapaian target kebijakan nasional mengenai Pendidikan untuk semua (*education for all*) dan dalam rangka pelaksanaan Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No 10 Tahun 1989 tentang batas wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;

34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) 2022 Dinas Pendidikan Kota Bandung disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan dukungan pendanaan dari APBD Kota Bandung dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung 2022 untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun di antaranya:

1. Mendiskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Wali Kota terpilih periode 2018-2023.

3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kota Bandung dengan kewenangan Dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021 disusun dalam empat Bab:

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisannya.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya (Tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi Anggaran untuk SKPD.

Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2022 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra.. Renja tahun 2022 memuat target kinerja tahun 2021 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

2.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2021

Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Kota Bandung tahun 2021 adalah yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1	2	3	4	5=(4/3)x100%	6	7	8
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1.01	Pendidikan						
1.01	Dinas Pendidikan						
1.01.02	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	557.323.825.630	520.599.977.387	93,41%	1. Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar 2. Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas 3. Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar 4. Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi 5. Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	1. 11,36 rasio 2. 35,82 rasio 3. 34,30 rasio 4. 2 unit 5. 100%	1. 11,59 rasio 2. 35,82 rasio 3. 34,30 rasio 4. 2 unit 5. 100%
1.01.02.2.03	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	51.243.197.000	42.768.212.828	83,46%	Telaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%
1.01.02.2.03.01	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3.827.860.150	3.162.294.443	82,61%	Jumlah satuan pendidikan TK Negeri yang difasilitasi pembangunannya	2 sekolah	2 sekolah

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1.01.02.2.03.18	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	30.077.503.850	22.371.630.407	74,38%	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Dikelola BOP PAUD	1000 sekolah	1074 sekolah
1.01.02.2.03.17	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	-	0,00%	Jumlah Peraturan Pemerintah	-	-
1.01.02.2.03.13	1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	373.978.000	308.257.296	82,43%	Jumlah satuan PAUD yang difasilitasi pembelajaran inklusifnya	64 lembaga	70 lembaga
					Jumlah satuan PAUD yang difasilitasi pembelajaran PAUD HIBER	60 lembaga	61 lembaga
					Jumlah TK Negeri yang difasilitasi biaya langganannya internetnya	4 sekolah	4 sekolah
					Terfasilitasinya Honor Tata Usaha dan Penjaga Sekolah Non PNS di TK Negeri	4 sekolah	4 sekolah
1.01.02.2.03.12	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	16.900.000.000	16.863.900.000	99,79%	Jumlah Lembaga Yang Diberi Bantuan Alat	100 lembaga	100 lembaga
1.01.02.2.03.10	1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	63.855.000	62.130.682	97,30%	Jumlah siswa PAUD yang difasilitasi perlengkapan alat pembelajarannya	450 sekolah	450 sekolah
1.01.02.2.04	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.172.603.570	16.002.589.639	98,95%	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Nonformal/Kesetaraan		
1.01.02.2.04.13	1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	215.170.000	212.107.920	98,58%	Tersedianya bahan evaluasi satuan pendidikan Kesetaraan	1 kegiatan	1 kegiatan
					Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetaraan	60 lembaga	68 lembaga
1.01.02.2.04.06	1.01.02.2.04.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	71.616.820	55.131.364	76,98%	Terpeliharanya gedung/ruang kelas	1 laporan	1 laporan
1.01.02.2.04.08	1.01.02.2.04.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00%	Tersedianya alat rumah tangga pnf	10 paket	-
1.01.02.2.04.12	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	83.865.000	76.048.752	90,68%	Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetaraan	60 lembaga	88 lembaga
1.01.02.2.04.07	1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	315.709.350	312.785.000	99,07%	Terpeliharanya gedung/ruang kelas	1 laporan	1 laporan
					Tersedianya mebeleur pnf	80 unit	80 unit
1.01.02.2.04.16	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	433.781.400	389.178.539	89,72%	Terfasilitasnya pembinaan dan pengembangan asesment center	150 orang	274 orang

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan dan kemitraan PAUD DIKMAS	4 kegiatan	4 kegiatan
					Terfasilitasinya penjaminan mutu pnf	150 lembaga	250 lembaga
					Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan non formal	1 kegiatan	-
					Tersedianya bahan evaluasi satuan pendidikan Kesetaraan	1 kegiatan	1 kegiatan
					Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetaraan	60 lembaga	60 lembaga
1.01.02.2.04.17	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.052.461.000	14.957.338.064	99,37%	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Dikelola BOP Non Formal/Kesetaraan	60 lembaga	72 lembaga
					Jumlah lembaga SKB Yang Dikelola BOP Non Formal/Kesetaraan	1 lembaga	1 lembaga
1.01.02.2.01	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	283.023.249.073	268.153.846.613	94,75%	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%
1.01.02.2.01.23	1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	72.520.000	72.520.000	100,00%	Dokumen Instrumen Kompetensi Minimal Siswa Sekolah Dasar	1	1

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1.01.02.2.01.06	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.809.544.200	15.170.499.766	85,18%	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri	4 paket	4 paket
					Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri	8 paket	8 paket
					Pembangunan Ruang Kelas SD Negeri	16 ruang kelas	16 ruang kelas
					Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Sanitasi Sekolah	5 paket	5 paket
					Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Sekolah	5 paket	5 paket
					Pembangunan Sanitasi Sekolah	20 paket	20 paket
					Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Benteng/Pagar SD	4 paket	4 paket
					Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Benteng/Pagar SD	4paket	4paket
					Pembangunan Benteng/Pagar SD	19 paket	19 paket
					Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Sumur Bor	2 paket	2 paket

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Sumur Bor	2 paket	2 paket
					Pembuatan sumur bor	13 paket	13 paket
	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	26.999.638.421	21.388.876.430	79,22%	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SD	6 paket	6 paket
					Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD	6 paket	6 paket
					Rehabilitasi Ruang Kelas SD	48 ruang kelas	48 ruang kelas
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	116 ruang	116 ruang
					Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya (DAK)	60 ruang	60 ruang
					Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	2 ruang	2 ruang
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan	2 ruang	2 ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					minimal sedang beserta perabotnya (DAK)		
					Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1 ruang	1 ruang
					Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK)	1 ruang	1 ruang
					Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (DAK)	13 paket	13 paket
					Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	13 paket	13 paket
					Peningkatan Fasilitas Mck Di Sekolah Dasar	50 paket	-
1.01.02.2.01.14	1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	31.236.864.940	29.298.210.000	93,79%	Pengadaan Mebeluer Sekolah	100 paket	100 paket
					Pengadaan mebelair dan kelengkapan ruang belajar kelas digital di SD (Banprov)	152 paket	147 paket
1.01.02.2.01.17	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	0,00%	Jumlah siswa SD yang diberi bantuan	40.681 siswa	-
1.01.02.2.01.21	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil	11.694.000.000	11.694.000.000	100,00%	Jumlah Siswa SD Swasta Yang Diberikan Bantuan Sosial	7.796 siswa	7796 siswa

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
	Peserta Didik Sekolah Dasar						
1.01.02.2.01.24	1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	267.920.000	267.920.000	100,00%	Dokumen Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1 dokumen	1 dokumen
1.01.02.2.01.25	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	583.759.320	548.903.320	94,03%	Jumlah Sekolah Dasar yang di fasilitasi dalam pengembangan kegiatan kesiswaan	457 sekolah	457 sekolah
1.01.02.2.01.28	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	470.621.200	417.756.200	88,77%	Jumlah Sekolah Yang di Fasilitasi Dalam Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis	274 sekolah	274 sekolah
1.01.02.2.01.29	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.250.071.069	155.571.078.414	98,31%	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengelolaan BOS	462 sekolah	462 sekolah
1.01.02.2.01.16	1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	35.638.309.923	33.724.082.483	94,63%	Pengadaan Laptop	1209 unit	1209 unit
					Pengadaan Komputer	274 unit	274 unit
					Pengadaan alat Hybrid Learning untuk PJJ dan PTM	274 paket	274 paket
					Pengadaan alat Prokes PTMT	274 sekolah	274 sekolah
					Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK)	10 sekolah	10 sekolah

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Pengadaan media pendidikan (DAK)	10 sekolah	10 sekolah
					Pengadaan Perangkat Edubook Penunjang Belajar Kolektif Di SD (Banprov)	58 paket	-
					Pengadaan alat bantu KBM guru dan siswa berbasis android untuk SD (Banprov)	33 paket	-
					Pengadaan mesin penggandaan dan kelengkapan ATK di SD (Banprov)	65 paket	-
					Pengadaan Alat Peraga Digital Sebagai Media Presentasi Dua Sisi Sekolah Dasar (Banprov)	241paket	241paket
1.01.02.2.02	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	206.884.775.987	193.675.328.307	93,62%	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%
1.01.02.2.02.41	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	244.560.000	233.530.000	95,49%	Tercapainya peningkatan mutu pengelola pendidikan	250 sekolah	250 sekolah
1.01.02.2.02.25	1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	2.470.510.350	1.900.634.000	76,93%	Jumlah fasilitas sekolah yang disediakan meubelair	40 ruang kelas	40 ruang kelas
1.01.02.2.02.02		37.619.578.534	31.697.014.407	84,26%	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	32 ruang kelas	32 ruang kelas

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru				Rehabilitasi Ruang Kelas	9 ruang kelas	9 ruang kelas
					Pembangunan Lapang Olahraga/Upacara	6 sekolah	6 sekolah
					Pembangunan Toilet	2 sekolah	2 sekolah
					Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya (DAK FISIK)	79 ruang	79 ruang
					Rehabilitasi Laboratorium IPA beserta perabotnya (DAK FISIK)	1 ruang	1 ruang
					Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya (DAK FISIK)	1 ruang	1 ruang
					Rehabilitasi ruang tata usaha beserta perabotnya (DAK FISIK)	2 ruang	2 ruang
					Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan sedang (DAK FISIK)	1 ruang	1 ruang
					Rehabilitasi ruang uks beserta perabotnya (DAK FISIK)	1 ruang	1 ruang
					Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan sedang (DAK FISIK)	4 ruang	4 ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Pengadaan peralatan LAB IPA FISIKA (DAK FISIK)	4 paket	4 paket
					Pengadaan peralatan LAB IPA BIOLOGI (DAK FISIK)	3 paket	3 paket
					Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi TIK (DAK FISIK)	8 paket	8 paket
					Pengadaan media pendidikan (DAK FISIK)	3 paket	3 paket
1.01.02.2.02.01	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	9.537.870.200	7.462.568.294	78,24%	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	2 sekolah	2
1.01.02.2.02.28	1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	0,00%	Jumlah siswa SMP yang diberi bantuan	-	-
1.01.02.2.02.32	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	43.919.500.000	43.808.500.000	99,75%	Jumlah Siswa SMP Swasta Yang Diberikan Bantuan Sosial	10.917 siswa	10.880 siswa
					Jumlah Mahasiswa Yang diberi Bantuan	3.191 mahasiswa	3.191 mahasiswa
1.01.02.2.02.36	1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	366.970.000	363.940.000	99,17%	Tercapainya Jumlah Sekolah yang difasilitasi Proses Belajar Mengajar	250 sekolah	250 sekolah
1.01.02.2.02.38	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	595.958.000	576.647.870	96,76%	Tercapainya peningkatan prestasi siswa	264 sekolah	264 sekolah

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1.01.02.2.02.42	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63.098.881.012	63.300.955.910	100,32%	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengelolaan BOS	234 sekolah	234 sekolah
1.01.02.2.02.27	1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	49.030.947.891	44.331.537.826	90,42%	Jumlah Sekolah Yang Difasilitasi Peralatan TIK	75 sekolah	75 sekolah
					Jumlah Pengadaan Sarana Belajar Kolektif Edubook Untuk Jenjang Smp (Banprov)	45 paket	45 paket
					Jumlah Pengadaan Peralatan Ruang Belajar Digital Learning Center Penunjang Belajar Mandiri Di Smp (Banprov)	20 paket	20 paket
					Jumlah Pengadaan Perangkat Mobile Interaktif Di Smp (Banprov)	88 paket	88 paket
					Jumlah Pengadaan Alat Bantu Kbm Guru Dan Siswa Berbasis Android Untuk Smp (Banprov)	39 paket	-
					Jumlah Pengadaan Video Wall Penunjang Smart School Di Smp (Banprov)	12 paket	-
					Jumlah Pengadaan Perangkat Command Center Untuk Smp (Banprov)	19 paket	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Jumlah Pengadaan Alat Peraga Digital Sebagai Media Presentasi Dua Sisi Smp (Banprov)	241 paket	241 paket
					Jumlah Pengadaan Perangkat Sarana Prasarana Kelas Pintar Sebagai Perwujudan Menuju Indonesia Maju (Banprov)	147 paket	-
					Jumlah Pengadaan Alat Pengumpulan Data Dan Presentasi Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Sekolah (Banprov)	59 paket	-
					Jumlah Pengembangan Pusat Data Dan Manajemen Informasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Banprov)	1 paket	-
					Jumlah Pengadaan Meubelair Dan Kelengkapan Ruang Belajar Kelas Digital Di Smp (Banprov)	133 paket	-
					Rehabilitasi Ruang Kelas	2 sekolah	2 sekolah
					Pembangunan Pgar Tembok	3 sekolah	3 sekolah
					Pembangunan Lapangan	1 sekolah	1 sekolah

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Olahraga/Lapangan Upacara		
1.01.03	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	550.410.000	287.100.500	52,16%	Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	100%	100%
1.01.03.2.01	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	550.410.000	287.100.500	52,16%	Jumlah dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2 Dokumen	2 Dokumen
1.01.03.2.01.01	1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.410.000	-	0,00%	Tercapainya Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengembangan Kurikulum SMP	250 sekolah	-
1.01.03.2.01.04	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	500.000.000	287.100.500	57,42%	Jumlah Dokumen Kurikulum	1 Dokumen	1 Dokumen
1.01.03.2.02	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	0,00%	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	-
1.01.03.2.02.02	1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	0,00%	Tersedianya bahan evaluasi satuan pendidikan Kesetaraan	0	-
					Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetaraan	0	-
					Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan non formal	0	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1.01.03.2.02.01	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	0,00%	Tersedianya bahan evaluasi satuan pendidikan Kesetaraan	0	-
					Terselenggaranya proses belajar nonformal/kesetaraan	0	-
					Tersusunnya kompetensi dasar muatan lokal pendidikan non formal	0	-
					Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan non formal	0	-
1.01.04	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	152.428.762.900	134.696.416.640	88,37%	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	71,46%	76,82%
1.01.04.2.01	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	152.428.762.900	134.696.416.640	88,37%	Tersusunnya dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen
1.01.04.2.01.01	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.877.530.900	3.662.756.000	46,50%	Terpetakan PTK Jenjang PAUD dan Dikdas Non ASN	2.000 orang	1.953 orang

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1.01.04.2.01.02	1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	144.551.232.000	131.033.660.640	90,65%	Tertatanya Pendistribusian PTK Jenjang PAUD dan Dikdas Non ASN	10.000 orang	7.165 orang
1.01.01	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.021.692.935.744	922.939.815.132	90,33%	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1
1.01.01.2.01	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	448.227.500	413.051.882	92,15%	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	8	8
1.01.01.2.01.01	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.337.500	106.215.518	83,41%	Jumlah Dokumen Rensra dan Renja Pendidikan	2	2
					Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pendidikan	4	4
1.01.01.2.01.06	1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	10.890.000	8.836.364	81,14%	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	2	2

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1.01.01.2.01.07	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.000.000,00	298.000.000,00	96,13%	Jumlah kegiatan evaluasi Pendidikan	4	4
1.01.01.2.02	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.001.961.052.683	905.323.823.589	90,36%	Jumlah Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah	2	2
1.01.01.2.02.01	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	#####	905.302.599.589,00	90,36%	Terealisasinya Gaji dan Tunjangan ASN (Jiwa)	19.629	19452
1.01.01.2.02.07	1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	122.144.000	21.224.000	17,38%	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	2
1.01.01.2.03	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	77.887.200	77.661.625	99,71%	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	4
1.01.01.2.03.05	1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	77.887.200,00	77.661.625,00	99,71%	Jumlah laporan BMD	6	6
1.01.01.2.06	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.385.467.821	11.985.058.185	89,54%	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1.01.01.2.06.04	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	376.463.590,00	359.126.300,00	95,39%	Tersedianya perlengkapan administrasi alat tulis kantor (Paket)	1	1
1.01.01.2.06.01	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.979.000,00	44.192.335,00	98,25%	Jumlah Gedung yang disediakan komponen dan instalasi kelistrikan	1	1
1.01.01.2.06.02	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	615.636.390,00	540.930.500,00	87,87%	Ketersediaan peratalan dan perlengkapan kantor (Bulan)	12	12
1.01.01.2.06.11	1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.671.760.400	10.464.106.950	89,65%	Jumlah SPBE yang Diimplementasikan (sistem)	1	1
					Jumlah Koneksi Jaringan Pendidikan SD	274	274
					Jumlah Koneksi Jaringan Pendidikan SMP	62	62
					Jumlah Kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Pendidikan	2	2
					Jumlah Kegiatan Bintek Digitalisasi Pendidikan	6	6
					Jumlah Pengadaan Data Center	1	1

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Jumlah Pengadaan Scanner Digitalisasi Dokumen	140	140
1.01.01.2.06.09	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.385.000,00	70.067.806,00	52,14%	Jumlah pelaksana/peserta Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Orang)	120	72
1.01.01.2.06.08	1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.498.000,00	56.575.600,00	73,00%	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)	12	12
1.01.01.2.06.06	1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	338.969.000,00	328.141.904,00	96,81%	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)	3	3
1.01.01.2.06.05	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.776.441,00	121.916.790,00	96,93%	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Jenis)	3	3
1.01.01.2.08	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.014.400.000	3.521.252.606	87,72%	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	100
1.01.01.2.08.04	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.401.260.000	3.318.085.400	97,55%	Tersedianya Personil Office Boy	12	12
					Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	1	1

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
					Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor	1	1
					Tersedianya Personil Security	8	8
					Tersedianya Personil Non PNS	35	35
					Tersedianya Personil Supir	2	2
1.01.01.2.08.02	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	613.140.000,00	203.167.206,00	33,14%	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12
1.01.01.2.09	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.805.900.540	1.618.967.245	89,65%	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	100
1.01.01.2.09.10	1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.845.000	144.853.000	94,77%	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	2	2

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1.01.01.2.09.01	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	867.555.000	726.155.635	83,70%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	131	131
1.01.01.2.09.09	1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	785.500.540	747.958.610	95,22%	Jumlah Gedung yang direhabilitasi Sedang/Berat	1	1

Tabel 2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
	Dinas Pendidikan					
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	1. Rasio	1. 11,36	1. 11,59	<p>Program Pengelolaan Pendidikan merupakan suatu program yang mengelola kegiatan serangkaian merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada jenjang PAUD, Non Formal/Kestaraan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.</p> <p>Formulasi Perhitungan indikator kinerja sebagai berikut:</p> <p>1. Rasio siswa PAUD terhadap Rombongan Belajar menunjukkan ketersediaan rombongan belajar terhadap siswa yang bersekolah di PAUD.</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
		2. Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas	2. Rasio	2. 35,82	2. 35,82	<p>Cara Pengukuran: Jumlah Siswa PAUD per Jumlah Ketersediaan Rombongan Belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Realisasi: 39.936 Siswa PAUD per 3.446 Ketersediaan Rombongan Belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini = 11,59 Rasio</p> <p>2. Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas menunjukkan kecukupan ketersediaan ruang kelas pada sekolah dasar terhadap siswa yang bersekolah di sekolah dasar Cara Pengukuran: Jumlah Siswa SD per Jumlah Ketersediaan Ruang Kelas pada satuan pendidikan sekolah dasar Realisasi: 211.938 Siswa SD per 5.916 Ketersediaan Ruang Kelas pada satuan pendidikan sekolah dasar = 35,82 rasio</p>
		3. Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	3. Rasio	3. 34,30	3. 34,30	3. Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar menunjukkan kecukupan ketersediaan rombongan belajar di SMP terhadap jumlah penduduk usia SMP (13-15 tahun) di kota Bandung

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
		<p>4. Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi</p> <p>5. Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar</p> <p>6. Cakupan Masyarakat Miskin</p>	<p>4. Unit</p> <p>5. persen</p> <p>6. persen</p>	<p>4. 2</p> <p>5. 100%</p> <p>6. 100%</p>	<p>4. 2</p> <p>5. 100%</p> <p>6. 100%</p>	<p>Cara Pengukuran: Jumlah Penduduk Usia SMP per Jumlah ketersediaan Rombongan Belajar Realisasi: 125.247 Penduduk Usia SMP per 3.651 ketersediaan Rombongan Belajar = 34,30 rasio</p> <p>4. Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi adalah bangunan SMP yang dibangun dan dilengkapi sarana dan prasarannya Cara Pengukuran: Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi tiap tahunnya Realisasi: 2 Unit Sekolah Baru yaitu SMPN 65 Bandung dan SMPN 66 Bandung</p> <p>5. Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar Cara Pengukuran: (jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan yang memenuhi standar/jumlah sekolah) x 100% Realisasi: (731 sekolah/731 sekolah) x 100% = 100%</p> <p>6. Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Pendidikannya</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
		yang Terlayani Pendidikannya				<p>Cara Pengukuran: (Jumlah Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) per Jumlah Siswa RMP yang diberi bantuan)</p> <p>Realisasi: (7.796 siswa RMP SD + 10.880 siswa RMP Siswa per 7.796 siswa RMP SD + 10.880 siswa) x 100% = 100%</p>
2	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	Persen	100%	100%	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal.</p> <p>Mulok diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
						<p>daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Cakupan kurikulum lokal yang diimplementasikan: (sekolah yang menerapkan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan /jumlah sekolah) x 100</p> <p>Realisasi: (731 sekolah/731 sekolah) x 100% = 100%</p>
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	71.64%	76.82%	<p>Berdasarkan Undang-undang RI angka 20 Tahun 2003, Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yg sinkron menggunakan kekhususannya, dan berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah energi profesional yg bertugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan pembimbingan serta pembinaan</p>

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
						<p>Menurut UU No.20 tahun 2013 mengemukakan bahwa, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten/ Seluruh jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan) x 100%</p> <p>Realisasi: (16.961 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten/ 22.079 Pendidik dan Tenaga Kependidikan) x 100% = 76,82%</p>

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Bandung mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tersebut belum di semua permasalahan pendidikan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
- b) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c) Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
- d) Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis. Berikut pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan:

Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI	KET.
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	70,31%	Tidak Mencapai Target
2	Pendidikan Dasar	100%	88,20%	Tidak Mencapai Target
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	Sesuai Target

Data tersebut bersumber dari Kemendikbud yang tercatat di dapodik dan Kemenag. Capaian kinerja indikator Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 89,89% dari target sebesar 100% dan capaian kinerja indikator Pendidikan Dasar sebesar 90,76% dari target sebesar 100%, capaian ini kurang dari target yang telah ditentukan. Capaian kurang dari target sebesar 10% yang diprediksi terdiri dari data:

1. Warga Kota Bandung yang bersekolah di luar Kota Bandung
2. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan *Homeschooling*
3. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan Pesantren

4. Warga Kota Bandung yang usianya tidak masuk kedalam kategori indikator (siswa SD yang berusia diluar 7-12 tahun dan siswa SMP yang berusia diluar 13-15 tahun)
5. Warga Kota Bandung yang bersekolah di satuan pendidikan yang belum terdaftar di Dapodik dan Kemenag. (Satuan pendidikan yang sudah melaksanakan KBM namun belum memiliki ijin pendirian satuan pendidikan)

Untuk memenuhi data tersebut, dinas pendidikan akan melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Memperdayakan penilik untuk melakukan pendataan warga kota Bandung yang belum sekolah
2. Membuat aplikasi untuk mendata warga kota Bandung yang belum bersekolah, bersekolah di *Homeschooling*, bersekolah di Pesantren, dan bersekolah di luar kota Bandung.
3. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pengumpulan data dengan beberapa instansi/lembaga sehingga data bisa terdata, terkumpul dan tersimpan dengan baik.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung

2.3.1 Visi dan Misi

2.3.1.1 Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung

Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”.

Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis diartikan sebagai kota yang mempunyai harga diri yang dapat dibanggakan oleh seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa bermartabat sebagai pusat pertumbuhan, khususnya sektor jasa yang

memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya dan nasional pada umumnya serta terlaksananya kehidupan beragama.

Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis memiliki dimensi:

- a. Pemenuhan kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, bersih, indah, hijau dan berbunga.
- b. Pemenuhan kondisi lingkungan kegiatan ekonomi dan sosial sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya.
- c. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk.
- d. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis.
- e. Pemenuhan wujud pembinaan umat beragama.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandung : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman : Terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia

seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera : Mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang merupakan manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta.

Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran gema masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap, dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Visi Kota Bandung 2018-2023 merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya *bertakwa* pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta kota yang teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi guna mencapai visi itu, sehingga diharapkan agar seluruh anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta mendorong keberhasilannya.

Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi

2.3.2 Tujuan dan Sasaran

- 1) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi masyarakat sejak usia dini sampai usia 44 tahun dalam rangka mewujudkan masyarakat berilmu, beriman, berketerampilan, beramal dan berperilaku/berakhlak mulia;
- 2) Meningkatkan kesiapan masukan, kualitas proses pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan untuk mengoptimalkan hasil dan dampak layanan pendidikan;
- 3) Mewujudkan layanan pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik yang kompetitif dalam persaingan memasuki pendidikan lanjutan, baik di tingkat daerah, regional, nasional dan internasional;
- 4) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada standar kompetensi peserta didik dan berdasarkan prinsip - prinsip pendidikan daerah dan standar pendidikan nasional;
- 5) Meningkatkan keprofesionalan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelolaan pendidikan hingga menjadi lembaga yang kompetitif dan mendapat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan SDM, baik di tingkat daerah, regional maupun nasional;
- 6) Meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang berdasarkan prinsip otonomi pendidikan dan otonomi sekolah.

2.3.3 Strategi dan Kebijakan

Dinas Pendidikan Kota Bandung memandang bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan dan diwujudkan melalui garis-garis kebijakan, rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas Pendidikan Kota Bandung dirumuskan melalui Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

A. Strategi Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, dengan arah kebijakan:

1. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun.
2. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD/SMP/MI/MTs dan Warga Belajar.
3. Perluasan sekolah inklusif SD dan SMP
4. Penuntasan buta aksara atau melek huruf.
5. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
7. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
8. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).

B. Strategi Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan penggunaan sumber daya utama (digital library infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah dan laboratorium).
2. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru.
3. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran.
4. Standar kualifikasi dan kompetensi guru.
5. Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak.
6. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal (PNFI).

C. Strategi Pendidikan Nonformal dan Kemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan pendidikan nonformal dan kemasyarakatan yang luwes dan fleksibel dan mampu mendukung kewirausahaan mandiri.
2. Membangun sistem terpadu pendidikan Kemasyarakatan dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan).

D. Strategi Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, dengan arah kebijakan:

1. Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran *stake-holders* dalam fungsi pengawasan.
2. Sistem informasi berbasis *ICT* untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua *stake-holders*.
3. Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan telaahan program usulan dari berbagai pihak (stakeholder) pendidikan mengenai berbagai isu pendidikan, maka program peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama di samping program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu pendidikan yang belum merata pada setiap sekolah, angka kelulusan siswa yang masih di bawah harapan serta siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi favorit masih rendah. Mengingat terbatasnya sumber daya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (resources) yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2022 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut:

- 1) Memiliki dampak yang signifikan, terukur, dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
- 2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2014-2021 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

Untuk itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ditujukan pada penguatan layanan pendidikan yaitu dengan terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif, dengan upaya meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu/relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Sedangkan tujuan strategis nasional dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana yang dikehendaki, yaitu:

- a) Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
- b) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
- c) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.

- d) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- e) Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan nasional yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana serta pendanaan dan tata kelola.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu faktual yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategis.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis).

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung dari penjabaran misi adalah Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses penyelenggaraan pendidikan dasar.
- 2) Meningkatnya SDM yang kreatif dan kompetitif.

- 3) Tersedianya SDM cerdas sejak dini.
- 4) Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan nonformal.
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan.
- 6) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

3.2.2 Sasaran

Secara detail, upaya penyediaan layanan pendidikan tahun 2021 dapat dilihat pada tingkatan per jenjang pendidikan yaitu:

Tabel 3.1
Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung
Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Satuan
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,77	Persen
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,17	Persen
Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	Persen
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05	Poin

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2018-2023, maka disusun program dan kegiatan untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1.01	Pendidikan			
1.01	Dinas Pendidikan			
1.01.02	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	738.517.179.141	1. Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar 2. Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas 3. Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar 4. Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi 5. Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar 6. Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Pendidikannya	1. 11,36 rasio 2. 35,82 rasio 3. 34,30 rasio 4. 2 unit 5. 100% 6. 100%
1.01.02.2.03	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	51.550.590.092	Telaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%
1.01.02.2.03.01	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.808.225.100	Jumlah satuan pendidikan TK Negeri yang difasilitasi pembangunannya	1 sekolah

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
1.01.02.2.03.02	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	664.338.912	Jumlah Satuan Pendidikan TK Negeri yang difasilitasi pembangunan pagar sekolah	2 sekolah
1.01.02.2.03.07	1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	487.412.200	Penyediaan lemari untuk sekolah	4 sekolah
			Penyediaan Meja dan Kursi Guru untuk Sekolah	4 sekolah
1.01.02.2.03.09	1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	297.255.280	Jumlah perangkat TIK yang disediakan	32 Unit
1.01.02.2.03.10	1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	318.175.000	Jumlah Peserta didik PAUD yang difasilitasi makanan tambahannya	550 siswa
			Jumlah Peserta didik PAUD yang difasilitasi perlengkapan sesuai SPM	550 siswa
1.01.02.2.03.12	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000		
1.01.02.2.03.13	1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	680.003.600	Jumlah satuan PAUD Hiber yang dibina pembelajarannya	61 Sekolah
			Jumlah satuan PAUD inklusi yang dibina pembelajarannya	65 Sekolah
			Jumlah satuan PAUD Literasi yang dibina pembelajarannya	65 Sekolah
			Jumlah satuan PAUD Prasiaga yang dibina pembelajarannya	65 Sekolah

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
1.01.02.2.03.15	1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	15.768.000.000	Jumlah PTK Non PNS PAUD Formal dan Non Formal/Kesetaraan yang difasilitasi honorinya	3371 Orang
1.01.02.2.03.17	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	628.308.000	Jumlah Penjaga Non PNS TK Negeri yang difasilitasi honorinya	4 Orang
			Jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi	100 Lembaga
			Jumlah TK Negeri yang difasilitasi langganan internetnya	4 Sekolah
			Jumlah TK Negeri yang difasilitasi langganan listriknya	1 sekolah
			Jumlah TU Non PNS TK Negeri yang difasilitasi honorinya	8 Orang
1.01.02.2.03.18	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.344.800.000	Tersalurkan dana BOP PAUD	1050 sekolah
1.01.02.2.03.19	1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	354.072.000	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti bintek dalam Penyusunan laporan BOP PAUD	1250 Orang
			Terevaluasi proses penyaluran BOP PAUD	1 Kegiatan
			Terevaluasi proses penyaluran BOP PAUD	180 Orang
1.01.02.2.04	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.155.485.550	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%
1.01.02.2.04.13	1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut	236.127.350	Jumlah lembaga yang mengikuti Asesmen Nasional	60 Lembaga

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
	Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah dokumen master soal upk paket A,B dan C	24 Dokumen
1.01.02.2.04.06	1.01.02.2.04.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	718.831.000	Pembangunan Benteng/Pagar SKB	180 m
			Rehabilitasi Ruang SKB	2 Ruang
1.01.02.2.04.12	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	80.510.000	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar nonforma/kesetaraan	140 orang
1.01.02.2.04.16	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	573.696.200	Jumlah lembaga pendidikan Nonfromal/Kesetaraan yang dibina	50 lembaga
			Jumlah orang yang difasilitasi pada kegiatan pembinaan kelembagaan kemitraan	100 orang
			Jumlah peserta didik yang diasesmen center	50 orang
1.01.02.2.04.17	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.181.800.000	Jumlah warga belajar yang diberi BOP pendidikan Nonformal	200 siswa
1.01.02.2.04.18	1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	364.521.000	Jumlah lembaga satuan pendidikan kesetaraan yang dibina	90 Lembaga
			Jumlah lembaga satuan pendidikan kesetaraan yang di fasilitasi BOP Kesetaraan	70 lembaga
1.01.02.2.01	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	391.140.091.498	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
1.01.02.2.01.23	1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.070.000.000	Jumlah Dokumen Pembelajaran Sekolah Dasar	6 Dokumen
1.01.02.2.01.06	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.020.169.520	Pembangunan Benteng / pagar	12 sekolah
			Pembangunan Lapangan Olahraga/Upacara	10 sekolah
			Pembangunan Ruang Kelas SD	36 ruang kelas
			Pembangunan Sanitasi/Toilet	24 sekolah
			Pembuatan Sumur Bor	20 sekolah
1.01.02.2.01.08	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	12.944.177.380	Rehabilitasi Berat Ruang SD	25 ruang
			Rehabilitasi Sedang Ruang SD	40 ruang
1.01.02.2.01.14	1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	6.697.236.000	Pengadaan Kursi Siswa	3640 unit
			Pengadaan Meja Siswa	3640 unit
1.01.02.2.01.17	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	34.577.400.000	Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri dan Swasta RMP yang dipenuhi kebutuhan perlengkapan	50000 siswa
1.01.02.2.01.21	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.914.480.000	Jumlah Siswa Sekolah Dasar Swasta yang difasilitasi dalam membantu operasional sekolah	7076 siswa
1.01.02.2.01.24	1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	484.000.000	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	3 dokumen
1.01.02.2.01.25	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	691.694.610	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang difasilitasi Lomba	1500 siswa

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
			Minat Bakat dan Kreatifitas	
1.01.02.2.01.28	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	749.000.000	Jumlah SDN yang difasilitasi dalam Peningkatan dan Pengelolaan Manajemen Sekolah	274 sekolah
1.01.02.2.01.29	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	198.550.211.336	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengelolaan BOS	426 sekolah
1.01.02.2.01.30	1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	273.100.000	Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang difasilitasi dalam Peningkatan Pengelolaan Dana BOS	426 sekolah
1.01.02.2.01.16	1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	34.122.882.652	Pengadaan Bilik Antiseptic Pengadaan Laptop Pengadaan Wastafel	274 sekolah 1510 unit 274 sekolah
1.01.02.2.01.26	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	53.045.740.000	Jumlah PTK Non PNS SD Negeri dan Swasta yang difasilitasi honorinya	1365 Orang
1.01.02.2.02	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	274.671.012.001	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%
1.01.02.2.02.41	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	244.560.000	Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250 sekolah
1.01.02.2.02.25	1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	6.711.242.195	Jumlah fasilitas sekolah yang disediakan meubelair	70 ruang kelas

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
1.01.02.2.02.02	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	48.835.669.142	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	57 ruang kelas
			Jumlah Ruang Kelas yang direhab	28 ruang kelas
			Pembangunan Lapangan Olahraga/Upacara	3 sekolah
			Pembangunan Toilet	5 sekolah
			Pembangunan Pagar Tembok	3 sekolah
1.01.02.2.02.01	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	15.389.419.000	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	4 sekolah
1.01.02.2.02.28	1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	22.951.500.000	Jumlah siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan yang diberi bantuan perlengkapan sekolah	25047 siswa
1.01.02.2.02.32	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	24.039.400.000	Jumlah siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan yang diberi bantuan Biaya Personil	16000 siswa
1.01.02.2.02.36	1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	366.970.000	Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	2 Laporan
1.01.02.2.02.38	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	595.958.000	Jumlah Sekolah yang mengikuti kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	250 sekolah
1.01.02.2.02.42	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	117.089.628.664	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengelolaan BOS	235 sekolah

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
1.01.02.2.02.43	1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	250.000.000	Jumlah sekolah yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	235 sekolah
1.01.02.2.02.27	1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.432.315.000	Jumlah Sekolah Yang Diberi Perlengkapan Pembelajaran Tatap Muka	75 sekolah
			Jumlah Sekolah Yang Difasilitasi Peralatan TIK	12 sekolah
1.01.02.2.02.39	1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.764.350.000	Jumlah PTK Non PNS SMP Negeri dan Swasta yang difasilitasi honorinya	1085 Orang
1.01.03	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	666.705.000	Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	100%
1.01.03.2.01	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	417.600.000	Cakupan Kurikulum Lokal Pendidikan Dasar yang Diimplementasikan	100%
1.01.03.2.01.01	1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150.000.000	Jumlah Dokumen Kurikulum	2 Dokumen
1.01.03.2.01.04	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	267.600.000	Jumlah Laporan Capaian Kurikulum Muatan Lokal	2 Dokumen
1.01.03.2.02	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	249.105.000	Cakupan Kurikulum Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
	Pendidikan Nonformal		Diimplementasikan	
1.01.03.2.02.02	1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	144.292.000	Jumlah dokumen silabus mulok pendidikan nonformal	2 Dokumen
1.01.03.2.02.01	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	104.813.000	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Mulok Pendidikan Nonformal	2 Dokumen
1.01.04	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11.499.581.000	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	71,81%
1.01.04.2.01	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.499.581.000	Tersusunnya dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen
1.01.04.2.01.01	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.499.581.000	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kompetensi PTK Jenjang Pendidikan Dasar, PAUD Formal, dan PAUD Non Formal/Kesetaraan beserta	13145 Orang

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
			Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong	
1.01.01	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.216.514.371.915	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
1.01.01.2.01	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.850.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	10 Dokumen
1.01.01.2.01.01	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.300.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
1.01.01.2.01.06	1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	44.550.000	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	3 Dokumen
1.01.01.2.01.07	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
1.01.01.2.02	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.196.836.429.145	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
1.01.01.2.02.01	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.196.736.651.145	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	12 Laporan
1.01.01.2.02.07	1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	99.778.000	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
1.01.01.2.03	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	169.264.000	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan
1.01.01.2.03.05	1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	169.264.000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
1.01.01.2.06	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.846.943.020	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
1.01.01.2.06.04	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	377.821.730	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Laporan
1.01.01.2.06.01	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.618.050	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Laporan
1.01.01.2.06.02	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	673.273.040	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan
1.01.01.2.06.11	1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.763.495.200	Jumlah Koneksi Jaringan Pendidikan SD	12 Bulan
			Jumlah Koneksi Jaringan Pendidikan SMP	12 Bulan
			Jumlah Koneksi Jaringan SIMDIK	12 Bulan
			Jumlah SPBE yang Diimplementasikan	1 Sistem
1.01.01.2.06.09	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.335.000	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
			SKPD sesuai prosedur	
1.01.01.2.06.08	1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	195.224.000	Cakupan Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	100%
1.01.01.2.06.06	1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	389.054.000	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Laporan
1.01.01.2.06.05	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.122.000	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Laporan
1.01.01.2.08	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.291.314.400	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1.01.01.2.08.04	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.678.174.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
1.01.01.2.08.02	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	613.140.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
1.01.01.2.09	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.708.663.350	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1.01.01.2.09.10	1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	254.023.000	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Laporan

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Outcome / Output	Target Outcome / Output
1.01.01.2.09.01	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.356.023.160	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpeliharaan	100%
1.01.01.2.09.09	1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.098.617.190	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Laporan
1.01.01.2.05	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.908.000	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan
1.01.01.2.05.09	1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.908.000	Jumlah Pegawai yang diberi pelatihan	100 Orang

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021 merupakan bagian dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023. Oleh karena itu, renja ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023 bersifat holistik dan integratif. Artinya pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau akan berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Bandung selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, berfungsi juga sebagai

sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.

Rencana Kerja juga dapat digunakan selain sebagai sarana atau pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung, juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.